

**KONTROL SOSIAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
PENERTIBAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL  
DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR**

Bagas Bintang Saputra  
NPP. 32.0513

Asdaf Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong  
Email: 32.0513@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Drs. H. Abdul Wahab, SH, MH

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The Sidoarjo Regency Civil Service Police Unit (Satpol PP), together with Customs, throughout 2024 has destroyed 54 million illegal cigarettes, with estimated state losses reaching Rp 38.7 billion. The circulation of illegal cigarettes in Sidoarjo has become a particular concern due to its negative impact on regional income and public order. The Sidoarjo Regency Government, through Regent Regulation Number 4 of 2022, assigns Satpol PP to enforce regional regulations and eradicate illegal cigarettes. Purpose:* This study aims to determine the social control carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in controlling the circulation of illegal cigarettes in Sidoarjo Regency. **Method:** *By using Qualitative method, this research will provide an in-depth understanding of how Satpol PP social control in handling the circulation of illegal cigarettes in Sidoarjo Regency and make this method a more effective approach in changing people's mindsets on the use of illegal cigarettes. Results/Findings:* The results show that the social control implemented by the Sidoarjo Regency Civil Service Police Unit in combating the circulation of illegal cigarettes has been effective. The data indicate a decrease in the number of violations related to the circulation of illegal cigarettes in Sidoarjo Regency. This conclusion is supported by the results of interviews, observations, and documentation conducted by the researchers in the field, which demonstrate that the three dimensions comprising 11 indicators from the theoretical framework used in this study have been well implemented. **Conclusion:** *The author concludes that the Civil Service Police Unit of Sidoarjo Regency has played a strategic role as a social control agent in regulating the circulation of illegal cigarettes in Sidoarjo Regency, and this role has been carried out effectively.*

**Keywords:** *Social Control, Satpol PP, Illegal Cigarettes*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang:** Satpol PP Kabupaten Sidoarjo bersama Bea Cukai sepanjang tahun 2024 telah memusnahkan 54 juta batang rokok ilegal dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 38,7 miliar. Peredaran rokok ilegal di Sidoarjo menjadi perhatian khusus karena berdampak buruk pada pendapatan daerah dan ketertiban umum. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 menugaskan Satpol PP untuk menegakkan peraturan daerah dan memberantas rokok ilegal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontrol sosial yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo. **Metode:** Dengan menggunakan metode Kualitatif Penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam bagaimana kontrol sosial Satpol PP dalam menangani peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo serta menjadikan cara ini sebagai pendekatan yang lebih efektif dalam mengubah pola pikir masyarakat pada penggunaan rokok ilegal. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol sosial yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi peredaran rokok ilegal dinilai mampu. Dibuktikan dengan data yang didapatkan menunjukkan bahwa adanya penurunan tingkat pelanggaran peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini juga terlihat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di lapangan, yang menunjukkan bahwa 3 dimensi yang terdiri dari 11 indikator dalam teori yang digunakan untuk penelitian ini terlaksana dengan baik. **Kesimpulan:** Penulis menyimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo memiliki peran strategis sebagai agen kontrol sosial dalam menertibkan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik.

**Kata kunci: Kontrol Sosial, Satpol PP, Rokok Ilegal**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang luas dengan kekayaan alam yang melimpah, baik hayati maupun non-hayati. Keberagaman yang dimilikinya, baik dari segi budaya, suku, hingga sumber daya alam, menjadikannya negara yang dihormati di kancah internasional. Salah satu hasil alam yang sangat diminati negara diluar sana ialah tembakau. Negara ini menduduki posisi keenam setelah Cina, Brazil, India, USA dan Malawi dengan jumlah produksi sebesar 136 ton atau sekitar 1,91% dari total produksi tembakau dunia. Tiga daerah penyumbang tembakau terbesar di Indonesia yakni provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Tengah. Menurut laporan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia terkait dengan produksi tembakau di wilayah Indonesia. Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang terbanyak tembakau di Indonesia pada tahun 2023 dengan jumlah 109.000 ton

tembakau. Disusul oleh provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Aceh dan wilayah-wilayah lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tembakau masih menjadi komoditas yang diminati baik dari kalangan dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan survei Global Adult Tobacco Survey (GATS), dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah perokok di Indonesia mengalami peningkatan dari 60,3 juta pada 2011 menjadi 69,1 juta pada 2021, dengan kenaikan sebesar 8,8 juta orang. Selain itu, prevalensi perokok aktif meningkat drastis hingga 10 kali lipat, dari 0,3% pada 2011 menjadi 3% pada 2021. orang. (Global Adult Tobacco Survey – GATS, 2024). *The burden of deaths and lost revenue caused by the illicit cigarette trade falls disproportionately on low- and middle-income countries. Eliminating this trade would avoid millions of premature deaths, and recover billions of dollars for governments.* Yang bermakna perdagangan rokok ilegal membawa dampak negatif yang besar terutama pada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Perdagangan ini tidak hanya menyebabkan kematian prematur dalam jumlah besar tetapi juga mengakibatkan kerugian pendapatan bagi pemerintah. Menghapus perdagangan rokok ilegal dapat mencegah jutaan kematian dini dan mengembalikan miliaran dolar ke kas negara. (Joossens.L & Merriam. D, Ross. H, Raw. M, 2010)

Evianny dan Sutiyo mendefinisikan penertiban sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, dengan tujuan menciptakan keteraturan dan kepatuhan sosial (Evianny. E & Sutiyo, 2023). Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, mencakup aspek ekonomi, hukum, dan sosial. Rokok ilegal sering kali tidak dilengkapi pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu, yang merugikan negara dari segi penerimaan pajak dan menciptakan persaingan tidak sehat di industri tembakau.

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi di Jawa Timur, menjadi lokasi strategis bagi jaringan peredaran rokok ilegal. Permasalahan ini dipicu oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya pengawasan di tingkat distribusi, tingginya permintaan masyarakat terhadap produk murah, dan rendahnya pemahaman konsumen tentang dampak rokok ilegal terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Selain itu, pelaku peredaran rokok ilegal memanfaatkan celah regulasi dan sistem penegakan hukum yang belum optimal untuk mengedarkan produk secara luas, baik melalui pasar tradisional, toko kelontong, maupun jalur berani. Pemerintah daerah, melalui sinergi dengan Bea Cukai dan aparat penegak hukum, telah berupaya meningkatkan pengawasan serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan kerugian rokok ilegal. Namun, efektivitas langkah-langkah ini sering kali terhambat oleh minimalnya sumber daya dan tingginya tingkat adaptasi pelaku kejahatan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan koordinasi yang lebih baik. Peredaran rokok ilegal yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya pemerintah dalam upaya untuk menindaklanjuti masalah ini mengeluarkan beberapa peraturan yang

bertujuan untuk mengendalikan serta menertibkan peredaran rokok di Indonesia. Salah satu regulasi utamanya adalah Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Undang – undang tersebut mengatur pemungutan cukai terhadap produk tembakau dan sanksi bagi pelaku yang melanggar aturan cukai ini. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan setiap produk tembakau (rokok) yang beredar di pasaran sudah membayar cukai dan mematuhi standar yang telah ditetapkan.

Tapi faktanya peredaran rokok ilegal masih banyak terjadi di wilayah negara ini. Contoh saja baru - baru ini di Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Taman dan Kecamatan Sukodono. Satuan Polisi Pamong Praja bersama Petugas Bea Cukai Sidoarjo mengamankan sebanyak 1.705 pak rokok 6 ilegal. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Sidoarjo menyatakan bahwa operasi gabungan ini dilakukan sebagai langkah untuk memberantas peredaran rokok ilegal yang semakin marak di masyarakat. (Redaksi Sidoarjo Terkini, 2024) Hal diatas menunjukkan bahwa regulasi mengenai peredaran rokok tersebut masih memiliki banyak kekurangan, terutama dalam mengatasi peredaran produk ilegal. Dengan tingginya permintaan konsumen terkait dengan rokok. Para pelaku usaha cenderung mencari cara untuk meraup keuntungan sebanyak – banyaknya dengan modal seminim mungkin alhasil mereka mencoba mengakali dengan memilih jalur ilegal atau bawah (tidak melalui proses perizinan) demi untuk mendapatkan pasokan rokok ilegal tersebut. Artinya banyak oknum penjual yang tidak memperhatikan ketertiban dalam memasok dan menjual rokok tersebut. Banyak pelaku usaha rokok yang tidak memiliki izin edar, mereka berjualan seenaknya sendiri tanpa memperhatikan faktor keselamatan konsumennya. Peredaran rokok tidak memiliki izin di Indonesia semakin mengkhawatirkan dan dapat mempengaruhi roda perekonomian negara.

Peredaran rokok ilegal yang semakin tinggi menunjukkan bahwa pentingnya penerapan kontrol sosial yang harus diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan ini. Kontrol sosial sangat relevan dalam memahami tingginya peredaran rokok ilegal di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar, kemudian dilanjutkan lagi pada pasal 255 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menjaga ketertiban umum serta ketenteraman, dan melindungi masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman dan tertib dari berbagai ancaman sosial. Ketentuan ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, khususnya Pasal 5, yang menetapkan tugas utama Satpol PP, yaitu menegakkan Perda dan Perkada, menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Trantibum adalah upaya integral dalam menjaga stabilitas sosial dan pembangunan masyarakat yang harmonis. Melalui koordinasi yang baik

antara pemerintah dan masyarakat, Trantibum dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua anggota masyarakat (Ilham. M & Abdul Rahman, 2023). Pengendalian rantai pasok sebagai strategi utama dalam memberantas perdagangan rokok ilegal. Studi ini menunjukkan bahwa negara-negara seperti Italia, Spanyol, dan Inggris berhasil mengurangi peredaran rokok ilegal secara signifikan melalui kontrol ketat terhadap distribusi dan produksi rokok, termasuk penerapan sistem pelacakan dan penandaan produk. (Joossens. L & Raw. M, 2008) Pendekatan ini sejalan dengan upaya yang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi peredaran rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, bekerja sama dengan Satpol PP dan instansi terkait, telah melaksanakan berbagai operasi penindakan terhadap rokok tanpa pita cukai atau dengan pita cukai palsu.

Dalam konteks penertiban peredaran rokok ilegal. Satpol PP berfungsi sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam menegakkan perda yang mengatur peredaran rokok. Satpol PP melakukan berbagai operasi penertiban, razia, dan patroli serta memeriksa surat izin usaha di tempat-tempat yang dicurigai sebagai pusat distribusi atau penjualan rokok ilegal dengan tujuan untuk mengurangi para pedagang penjual rokok nakal. Peran ini menjadi sangat penting mengingat minimnya kesadaran kepatuhan terhadap regulasi tentang pengadaan rokok di beberapa daerah, terutama di kawasan yang memiliki tingkat konsumsi rokok yang tinggi, baik karena pengaruh wisata maupun kegiatan ekonomi lokal.

Selain tugas penertiban, Satpol PP juga memiliki peran preventif, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya rokok ilegal. Satpol PP berusaha untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan peredaran rokok demi kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman sosial serta meningkatkan perekonomian negara yang disebabkan oleh pedagang rokok ilegal. Namun demikian, peran Satpol PP dalam pengawasan peredaran rokok ilegal sering kali dihadapkan pada berbagai kendala. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk operasi penertiban. Operasi yang dilakukan biasanya bersifat sporadis dan hanya menargetkan lokasi-lokasi tertentu, sehingga distribusi rokok ilegal di tempat-tempat lain masih bisa berlangsung. Selain itu, ada juga tantangan dari segi penegakan hukum yang terkadang tidak 11 konsisten atau adanya oknum yang terlibat dalam melindungi peredaran rokok ilegal. Secara keseluruhan, peran Satpol PP dalam penertiban peredaran rokok ilegal di Indonesia sangatlah krusial. Satpol PP tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi rokok ilegal. Meskipun menghadapi berbagai tantangan. Upaya yang terus dilakukan oleh Satpol PP dengan dukungan dari berbagai pihak diharapkan mampu mengurangi peredaran rokok ilegal dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan peredaran

rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya melalui regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, peredaran rokok ilegal masih sulit dikendalikan. Salah satu pihak yang berperan penting dalam penanganan masalah ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas melakukan penegakan perda dan menjaga ketertiban umum. Namun, dalam praktiknya, peran Satpol PP masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan efektivitas kontrol sosial dalam menertibkan rokok ilegal belum optimal.

*Research* GAP penelitian ini terletak pada belum maksimalnya kontrol sosial yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penertiban peredaran rokok ilegal. Kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan personel, fasilitas operasional yang kurang memadai, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal, dan semakin kompleksnya modus operandi para pelaku. Meskipun ada kebijakan dan operasi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, hasilnya masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dan implementasinya di lapangan. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada peran sinergi antara Satpol PP dan Bea Cukai, sementara penelitian ini lebih menyoroti peran mandiri Satpol PP sebagai agen kontrol sosial dalam konteks lokal Kabupaten Sidoarjo.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan melihat kontrol sosial dari perspektif peran Satpol PP secara spesifik dan terpisah dari keterlibatan instansi lain. Selain itu, kajian ini juga menawarkan pemahaman baru tentang tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap peredaran rokok ilegal, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kontrol tersebut. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika kontrol sosial yang diterapkan oleh Satpol PP di Kabupaten Sidoarjo.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penertiban rokok ilegal. Penelitian mengenai penertiban rokok ilegal telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan menggunakan metode kualitatif. Salah satu penelitian yang relevan adalah dari Ni Putu Juniasti Sanistya Putri yang meneliti tentang sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Bea Cukai dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara kedua lembaga tersebut belum maksimal karena adanya beberapa kendala di lapangan (Sanistya.N.P.J, 2024). Selain itu, penelitian lain dilakukan oleh Yunda Rudita mengenai pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun upaya pengawasan telah dilaksanakan secara maksimal, masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan cakupan wilayah yang luas (Rudita. Y, 2018). Juli Anglaina juga melakukan penelitian dengan fokus pada pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menemukan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait masih perlu ditingkatkan guna memaksimalkan pengawasan. Faktor penghambat utama adalah kecanggihan teknik yang digunakan oleh pengusaha ilegal dalam mengedarkan rokok tanpa cukai (Anglaina.J, 2019). Dwi Kurniawan melakukan penelitian dengan konsep kontrol sosial terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kontrol sosial masyarakat Duri Kosambi terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dalam bentuk preventif dan represif (Kurniawan.D, 2023). Penelitian lain oleh Fadhilla Ayu Nur Setiawati menyoroti peran Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Kudus dalam menyosialisasikan larangan pembuatan rokok ilegal. Metode penelitian yang digun akan adalah deskriptif kualitatif, dan hasilnya menunjukkan bahwa Diskominfo berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti sosialisasi langsung dan pemasangan spanduk (Setiawati. F. A. N, 2023). Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penertiban rokok ilegal melibatkan berbagai pihak, mulai dari Satpol PP, Bea Cukai, hingga instansi komunikasi pemerintah. Faktor penghambat yang sering ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, luasnya cakupan wilayah, dan teknik canggih dari pelaku ilegal. Studi yang dilakukan oleh Michelle Scollo memberikan wawasan tentang pentingnya kolaborasi dalam penelitian untuk menghasilkan estimasi yang akurat mengenai perdagangan rokok ilegal. Sementara itu, penelitian ini menyoroti pentingnya kontrol sosial dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran rokok ilegal di tingkat lokal. (Scollo. M, 2025).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini berfokus pada kajian kontrol sosial dalam upaya mengatasi peredaran rokok ilegal, sebuah topik yang belum banyak diteliti sebelumnya. Studi mengenai kontrol sosial, khususnya yang melibatkan peran Satpol PP, masih tergolong minim, karena umumnya penelitian lebih menyoroti aspek efektivitas pengawasan rokok ilegal (Maulana, H. Amir, S dan Seri. H, 2023), penegakan hukum terhadap pelanggar rokok ilegal (Permana. D. E. W. & Sanusi. S, 2021) serta tugas pokok dan fungsi Satpol PP lainnya. Padahal, kontrol sosial merupakan aspek penting bagi Satpol PP yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai implementasi kontrol sosial oleh Satpol PP dalam menjaga ketentraman dan

ketertiban umum, khususnya terkait upaya menciptakan kawasan bebas rokok ilegal. Dengan demikian, penelitian ini berperan penting dalam memperluas pemahaman mengenai praktik kontrol sosial dalam konteks tugas Satpol PP.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontrol sosial yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beserta tantangan dan upaya dalam pada peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

## **II. METODE**

Penelitian adalah suatu proses sistematis dalam mencari kebenaran atau pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan secara sistematis, terorganisir, dan terstruktur (Sugiyono, 2024). Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Metode deskriptif yang diterapkan bertujuan untuk memahami dan menggambarkan masalah pelanggaran peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data faktual tanpa adanya manipulasi. Selain itu, pendekatan induktif digunakan untuk menggali data yang mencerminkan realitas di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini mengombinasikan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, menghasilkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumen, gambar, dan catatan lapangan.

Metode penelitian kualitatif didasarkan pada paradigma *postpositivisme* yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang sarat makna. Oleh karena itu, Penulis memilih menggunakan penelitian kualitatif karena dalam kegiatan penelitian dilakukan secara mendalam untuk memahami makna di balik fenomena sosial yang diteliti. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas data untuk mendukung dalam perancangan penelitian, berbeda dengan metode kuantitatif yang cenderung memiliki struktur yang lebih kaku dan terstandar. Penelitian kualitatif memungkinkan adanya penyesuaian rencana penelitian sesuai dengan situasi dan temuan yang muncul di lapangan (Simangunsong, 2017). Data yang dihasilkan tidak berupa angka, melainkan berasal dari wawancara, laporan, arsip pribadi, serta dokumen pendukung lainnya. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Dimana pada penelitian ini informan yang dijadikan narasumber adalah Kasatpol PP Kabupaten Sidoarjo, Sekretaris Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dan Kabid Penegak Perundang-Undangan Satopol PP Kabupaten Sidoarjo dikarenakan keahlian dalam penanganan objek penelitian. Pada penelitian ini, digunakan operasional konsep Kontrol Sosial yang didasarkan pada teori Travis Hirschi. mengidentifikasi empat elemen utama yang mencegah individu melanggar norma sosial dan terlibat dalam perilaku kriminal (Hirschi.T, 1969)

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah triangulasi data, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan, sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman (Huberman. M. D, 2019). Kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik IPDN tahun 2024/2025, bertempat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kontrol sosial yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo. Hirschi mengemukakan terdapat empat unsur utama dalam kontrol sosial yang terkandung didalam proposisinya, yaitu *attachment* (keterikatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan) dan *belief* (kepercayaan). Semakin kuat keempat unsur tersebut maka semakin kuat ikatan sosial yang terbentuk sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran atau penyimpangan semakin kecil. Dapat dikatakan bahwa pelanggaran peredaran rokok secara ilegal cenderung memiliki risiko lebih rendah apabila ikatan sosial berfungsi secara efektif dalam mengendalikan perilaku tetap patuh terhadap peraturan yang berlaku.. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### 3.1. *Attachment* Atau Keterikatan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Rokok Ilegal.

Keterikatan atau *attachment* dalam konteks Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban rokok ilegal merupakan elemen penting dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan daerah terkait cukai. Satpol PP berperan sebagai garda terdepan dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang melanggar undang-undang dan peraturan daerah. Keterikatan ini diwujudkan melalui sinergi antara Satpol PP dengan masyarakat, aparat hukum, dan instansi lain, termasuk Bea Cukai. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, Satpol PP tidak hanya melakukan razia dan penyitaan, tetapi juga edukasi dan sosialisasi tentang bahaya rokok ilegal serta konsekuensi hukumnya. Dimensi *attachment* atau keterikatan dalam teori kontrol sosial Travis Hirschi merupakan salah satu elemen penting yang mengendalikan perilaku individu agar tidak melakukan tindakan menyimpang. Keterikatan mencerminkan seberapa kuat hubungan emosional dan sosial seseorang dengan orang lain atau kelompok sosialnya. Hirschi berpendapat bahwa semakin kuat keterikatan individu dengan lingkungannya, semakin kecil kemungkinan mereka terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk pelanggaran hukum seperti peredaran rokok ilegal.

Keterikatan dalam konteks penelitian ini menggambarkan hubungan emosional antara aparat Satpol PP dengan masyarakat, serta hubungan sosial antar anggota Satpol PP sendiri dalam upaya memberantas peredaran rokok ilegal. Ketika aparat memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat, masyarakat cenderung lebih mendukung upaya penertiban rokok ilegal karena merasa dilibatkan dan dihargai. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa keberhasilan kontrol sosial tidak lepas dari adanya rasa saling percaya antara

penegak hukum dan masyarakat. Salah satu bentuk keterikatan Satpol PP dengan masyarakat terlihat pada upaya kolaboratif dalam memberantas rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo. Satpol PP menggandeng masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif, seperti melibatkan tokoh lokal dan komunitas dalam menyebarkan kesadaran akan bahaya rokok ilegal. Hal ini dilakukan melalui kampanye, pemasangan spanduk, media sosial, serta edukasi langsung kepada pemilik kios dan pedagang kaki lima. Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Drs. Yani Setiawan, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat karena cukai hasil tembakau digunakan untuk program sosial. Dengan demikian, keterikatan sosial ini menjadi landasan kuat untuk mengurangi peredaran rokok ilegal secara efektif.

Lebih lanjut, keterikatan juga dapat dilihat dari hubungan internal dalam organisasi Satpol PP. Aparat yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan rekan kerjanya akan bekerja lebih efektif dan profesional. Mereka saling mendukung dalam menjalankan tugas sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindakan menyimpang lainnya. Oleh karena itu, pembinaan internal dalam Satpol PP juga sangat diperlukan untuk memperkuat rasa solidaritas dan tanggung jawab bersama. Secara keseluruhan, keterikatan antara Satpol PP dan masyarakat sangat berpengaruh dalam keberhasilan penertiban rokok ilegal. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari sosialisasi hingga pengawasan, Satpol PP dapat menekan peredaran rokok ilegal secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Meskipun masih ada kendala internal dalam hal profesionalisme anggota, komitmen untuk terus meningkatkan keterlibatan sosial akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Oleh karena itu, kolaborasi antar instansi dan peningkatan kapasitas aparat perlu terus dikembangkan demi keberhasilan pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti mendapati hasil bahwa pada 3 indikator dimensi ini telah terpenuhi seluruhnya. Baik itu pada indikator tingkat kepedulian terhadap pendapat orang lain, frekuensi interaksi masyarakat, dan tingkat ketergantungan emosional pada dukungan masyarakat.

### **3.2. *Commitment* Atau Komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Rokok Ilegal.**

Komitmen merupakan upaya serius dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi atau instansi, komitmen mengacu pada dedikasi dan kesungguhan anggota dalam melaksanakan tugas dan mencapai visi serta misi yang telah ditentukan. Komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam memberantas peredaran rokok ilegal merupakan wujud nyata dari keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan cukai dan melindungi konsumen.

Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai pendekatan, baik preventif maupun represif. Pada aspek preventif, Satpol PP aktif mengadakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait dampak negatif rokok ilegal

serta pentingnya mematuhi aturan cukai. Edukasi dilakukan secara langsung maupun melalui kampanye kesadaran dengan media sosial, spanduk, dan brosur. Selain itu, Satpol PP juga melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas dalam meningkatkan kesadaran kolektif terkait bahaya rokok ilegal. Selain pendekatan preventif, komitmen ini juga tercermin dari tindakan represif yang dilakukan secara terstruktur. Satpol PP rutin melakukan patroli, razia, dan operasi gabungan dengan instansi terkait, termasuk Bea Cukai dan pihak kepolisian. Operasi ini ditujukan untuk menyita rokok tanpa pita cukai serta memberikan sanksi kepada pedagang yang melanggar.

Upaya ini tidak hanya sebatas tindakan represif tetapi juga memberikan edukasi langsung kepada para pelanggar. Dengan adanya sinergi antarinstansi, diharapkan peredaran rokok ilegal dapat ditekan secara signifikan. Indikator pertama dari komitmen adalah prestasi akademik atau kinerja di tempat kerja. Komitmen dalam hal ini tercermin melalui produktivitas dan pencapaian yang diraih oleh individu atau kelompok. Misalnya, dalam konteks Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, komitmen terlihat dari keberhasilan mereka dalam melakukan penertiban peredaran rokok ilegal secara rutin, melibatkan operasi, sosialisasi, dan kerja sama dengan instansi lain untuk memastikan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau tetap terjaga. Dan Indikator kedua dari komitmen adalah aspirasi masa depan. Komitmen ini terlihat ketika individu atau kelompok memiliki visi jangka panjang dan berupaya keras untuk mencapainya. Misalnya, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menunjukkan komitmen mereka dengan merancang program berkelanjutan dalam pemberantasan rokok ilegal, termasuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kemampuan personel guna mendukung efektivitas penertiban.

Untuk meningkatkan komitmen, organisasi perlu memberikan penghargaan terhadap prestasi dan memastikan bahwa anggotanya memiliki visi masa depan yang jelas. Pelatihan dan peningkatan kapasitas juga dapat membantu individu memahami pentingnya peran mereka dalam organisasi. Dengan demikian, komitmen dapat dipertahankan dalam jangka panjang dan tidak hanya menjadi sebatas formalitas. Hal ini penting agar tujuan organisasi, seperti pemberantasan rokok ilegal oleh Satpol PP, dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti mendapati hasil bahwa pada 2 indikator dimensi ini telah terpenuhi seluruhnya. Baik itu pada pada indikator prestasi akademik atau kinerja di tempat kerja dan aspirasi masa depan.

### **3.3. *Involvement* Atau Keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Rokok Ilegal.**

Keterlibatan atau *involvement* merupakan upaya aktif dari individu atau kelompok dalam berpartisipasi secara langsung pada suatu kegiatan atau program. Dalam konteks kontrol sosial, keterlibatan mencakup tindakan nyata dalam mendukung pelaksanaan kebijakan atau program yang telah ditetapkan. Tingginya

tingkat keterlibatan menunjukkan adanya rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya peran aktif dalam mencapai tujuan bersama, baik dalam organisasi maupun di masyarakat. Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo memiliki peran penting dalam penertiban peredaran rokok ilegal di wilayahnya. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, Satpol PP bertindak sebagai koordinator lokal yang menjembatani upaya penertiban rokok ilegal. Keterlibatan Satpol PP meliputi berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi hingga operasi gabungan dengan instansi lain seperti Bea Cukai dan Kepolisian. Melalui sinergi dengan instansi terkait, Satpol PP melakukan kegiatan terstruktur untuk memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara melalui kehilangan pendapatan cukai.

Dalam menangani peredaran rokok ilegal, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo secara aktif berkolaboratif dengan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan secara langsung kepada pemilik toko, pedagang kaki lima, serta masyarakat umum mengenai bahaya rokok ilegal dan konsekuensi hukumnya. Selain itu, kampanye kesadaran melalui media sosial, spanduk, dan brosur juga gencar dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif rokok ilegal terhadap ekonomi dan kesehatan.

Selain tindakan represif seperti razia dan penyitaan, Satpol PP juga menerapkan pendekatan persuasif. Mereka melakukan edukasi terkait bahaya rokok ilegal dan upaya preventif lainnya agar masyarakat dapat memahami dampaknya. Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan aktivitas ilegal melalui kanal pengaduan juga dipandang penting. Pendekatan ini dilakukan agar masyarakat merasa memiliki peran dalam mengurangi peredaran rokok ilegal dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Meskipun keterlibatan Satpol PP telah terencana dengan baik, masih ada sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Jadwal kegiatan Satpol PP sering berbenturan dengan kegiatan instansi lain dalam pelaksanaan operasi gabungan. Hal ini menyebabkan efektivitas penertiban tidak selalu maksimal. Satpol PP menyadari bahwa peningkatan kapasitas personel dan optimalisasi koordinasi lintas instansi sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Dalam kasus Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, mereka secara aktif mengalokasikan waktu untuk melaksanakan operasi penertiban rokok ilegal. Selain melakukan tindakan represif melalui razia, mereka juga melibatkan diri dalam kegiatan preventif dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemilik usaha terkait bahaya rokok ilegal serta dampaknya terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat. Keterlibatan juga diukur dari seberapa besar partisipasi individu atau organisasi dalam kegiatan masyarakat. Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi dengan aktif terlibat dalam kampanye edukasi yang melibatkan Bea Cukai, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat. Melalui kerja sama tersebut, mereka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif rokok ilegal sekaligus meningkatkan kesadaran untuk tidak memperjualbelikan produk tanpa cukai. Indikator keterlibatan lainnya

adalah frekuensi interaksi dengan pihak di luar lingkungan kerja. Satpol PP Kabupaten Sidoarjo membangun koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Bea Cukai dan kepolisian, serta melibatkan masyarakat dalam upaya memberantas peredaran rokok ilegal. Kolaborasi antar instansi ini memastikan adanya keterlibatan lintas sektor dalam menekan peredaran produk ilegal tersebut.

Keterlibatan Satpol PP juga mencakup upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan peredaran rokok ilegal. Pemerintah daerah menyediakan kanal pengaduan yang memungkinkan masyarakat melaporkan aktivitas ilegal secara langsung. Langkah ini dianggap sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi peredaran rokok ilegal. Pelibatan komunitas lokal seperti karang taruna dan tokoh masyarakat juga dilakukan untuk memperkuat pengawasan berbasis komunitas. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti mendapati hasil bahwa pada 3 indikator dimensi ini telah terpenuhi seluruhnya. Baik itu pada indikator jumlah waktu yang dihabiskan untuk kegiatan razia dan sosialisasi, tingkat partisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan frekuensi interaksi dengan orang lain di luar lingkungan kerja.

### **3.4. *Believe* Atau Kepercayaan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Rokok Ilegal.**

Kepercayaan memiliki peran penting dalam upaya mencapai tujuan, terutama dalam konteks penertiban rokok ilegal. Bagi Satpol PP, kepercayaan masyarakat dapat dibangun melalui transparansi dalam pelaksanaan tugas, konsistensi dalam penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan yang telah ditetapkan. Melalui komunikasi yang terbuka, tindakan hukum yang tegas dan adil, serta edukasi yang efektif, Satpol PP berupaya meningkatkan kepercayaan publik. Upaya ini dilakukan dengan memberikan informasi secara terbuka terkait operasi yang dilakukan, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat adalah adanya persetujuan terhadap hukum dan aturan yang diterapkan. Sebagai lembaga penegak peraturan daerah, Satpol PP memastikan kepastian hukum dalam setiap tindakan, terutama dalam penertiban rokok ilegal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Anas Ali Akbar, disebutkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dilakukan melalui kolaborasi dengan Bea Cukai dan instansi terkait. Pada operasi gabungan, selain penyitaan rokok ilegal, Satpol PP juga memberikan edukasi kepada pedagang mengenai konsekuensi hukum serta melakukan pemusnahan rokok ilegal secara terbuka guna menjaga kepercayaan public. Kepercayaan masyarakat juga diperkuat dengan keyakinan bahwa tindakan melanggar hukum akan membawa konsekuensi negatif. Satpol PP melakukan kegiatan razia secara rutin untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum. Selain itu, sanksi yang diberikan tidak hanya berupa penyitaan

barang ilegal tetapi juga tindakan hukum lebih lanjut jika pelanggaran bersifat masif atau melibatkan distribusi besar. Kegiatan ini menciptakan efek jera di kalangan masyarakat dan meningkatkan keyakinan bahwa tindakan ilegal akan berujung pada konsekuensi yang tegas.

Selain itu, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo berusaha membangun kepercayaan masyarakat dengan terus meningkatkan kompetensi anggotanya. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan diri yang berfokus pada pemahaman hukum dan keterampilan komunikasi. Hal ini dilakukan agar anggota Satpol PP dapat menjalankan tugasnya secara profesional, sekaligus meningkatkan moralitas individu dalam penegakan hukum. Dengan menjaga motivasi anggota serta meningkatkan kemampuan, diharapkan masyarakat semakin percaya pada kinerja Satpol PP dalam menertibkan rokok ilegal.

Salah satu indikator utama dari dimensi kepercayaan adalah persetujuan terhadap hukum dan aturan. Ketika individu atau kelompok memiliki keyakinan bahwa aturan hukum adalah hal yang benar, mereka akan berusaha untuk mematuhi. Dalam konteks penertiban rokok ilegal, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo bertindak sebagai pengawas kebijakan pemerintah dengan memastikan bahwa aturan yang diterapkan dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tindakan represif yang dilakukan memiliki legitimasi dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Indikator berikutnya adalah keyakinan bahwa melanggar aturan akan membawa konsekuensi negatif. Ketika masyarakat menyadari bahwa tindakan ilegal akan berdampak buruk, mereka akan cenderung menghindarinya. Satpol PP Kabupaten Sidoarjo membangun kepercayaan ini dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak negatif rokok ilegal. Selain tindakan penertiban, edukasi mengenai kerugian ekonomi dan risiko kesehatan akibat rokok ilegal turut memperkuat kesadaran masyarakat agar tidak mendukung peredarannya,

Tingkat moralitas individu merupakan indikator penting dalam dimensi kepercayaan. Moralitas mencerminkan sejauh mana seseorang memahami dan mematuhi aturan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Dalam konteks Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, moralitas anggota Satpol PP ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas agar mereka mampu memberikan contoh yang baik dalam menjalankan tugas. Dengan moralitas yang tinggi, anggota Satpol PP dapat lebih efektif dalam mengajak masyarakat untuk taat pada aturan.

Secara keseluruhan, kepercayaan Satpol PP dalam melaksanakan penertiban rokok ilegal sangat bergantung pada transparansi, konsistensi hukum, dan partisipasi masyarakat. Dengan terus meningkatkan profesionalisme serta menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, Satpol PP dapat meningkatkan efektivitas penertiban rokok ilegal. Upaya ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum tetapi juga menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya mematuhi aturan demi menjaga kesehatan masyarakat dan ekonomi negara. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti mendapati hasil bahwa pada 3 indikator dimensi ini telah terpenuhi seluruhnya. Baik itu pada indikator

persetujuan terhadap hukum dan aturan, keyakinan bahwa tindakan melanggar hukum akan membawa konsekuensi negatif, dan tingkat moralitas individu.

### 3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pemetaan dari penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini, baik dari segi metode penelitian, teori yang digunakan, maupun objek penelitian. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kontrol sosial yang diterapkan oleh aparat Satpol PP, khususnya dalam upaya penegakan peraturan daerah, telah berhasil dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Namun, perbedaan utamanya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian ini secara spesifik berfokus pada upaya penertiban peredaran rokok ilegal oleh Satpol PP di Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian, objek penelitian yang berbeda ini menjadi nilai kebaruan dalam penelitian ini.

Penelitian sebelumnya umumnya belum banyak membahas secara khusus mengenai penerapan kontrol sosial oleh Satpol PP dalam konteks pemberantasan peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait situasi di lapangan. Dalam penelitian ini, teori kontrol sosial dari Travis Hirschi diterapkan untuk memahami bagaimana kontrol sosial yang dilakukan oleh Satpol PP mampu menangani pelanggaran peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo. Teori ini mencakup empat elemen kontrol sosial: *attachment* (keterikatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (kepercayaan) yang semuanya berperan dalam mencegah perilaku menyimpang (Siahaan.S. Br, 2019).

Beberapa temuan penting dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kontrol sosial oleh Satpol PP dalam konteks rokok ilegal. Kontrol sosial oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo berjalan efektif dalam menertibkan pedagang kaki lima yang menjual rokok ilegal. Dibandingkan penelitian Anglaina, pada penelitian ini terdapat faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia, luasnya cakupan wilayah, cara yang dipakai oleh oknum pengusaha ilegal semakin canggih. Hal ini mengakibatkan pengawasan terhadap rokok ilegal di Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan maksimal (Anglaina. J, 2019)

Satpol PP Kabupaten Sidoarjo berhasil melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penyebaran rokok ilegal di wilayah strategis yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Sama dengan penelitian yang dilakukann oleh Yunda Rudita terkait dengan pengawasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir. Pada penelitian Yunda pelaksana pengawasan rokok ilegal dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. (Rudita. Y, 2018)

Masyarakat mengapresiasi upaya Satpol PP dalam melakukan kontrol sosial secara persuasif untuk mencegah peredaran rokok ilegal. Dikarenakan mereka dapat lebih memahami terkait dengan dampak yang ditimbulkan dengan adanya rokok

ilegal. Dwi Kurniawan melakukan penelitian dengan teori serupa. Dimana hasil dalam penelitiannya menunjukkan upaya preventif dan represif terkait dengan penyalahgunaan narkoba berjalan dengan baik. (Kurniawan. D, 2023) Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu adanya keterbatasan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan dalam memerangi rokok ilegal membuat kinerja Satpol PP berjalan kurang maksimal (Putri. N. P. J. S, 2024)

Secara keseluruhan, penerapan kontrol sosial oleh Satpol PP dalam penertiban peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan dengan baik, namun masih menghadapi tantangan dari segi sumber daya dan kompleksitas modus pelaku. Upaya peningkatan kapasitas serta koordinasi dengan pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan ke depannya. Adanya kegiatan ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu membebaskan Kabupaten Sidoarjo dari peredaran rokok ilegal yang dapat memberikan dampak negatif bagi negara, pemerintah, masyarakat dan diri pribadi.

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo memiliki peran strategis sebagai agen kontrol sosial dalam menertibkan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di lapangan, yang menunjukkan bahwa 3 dimensi yang terdiri dari 11 indikator dalam teori yang digunakan dalam penelitian ini terlaksana dengan baik. Namun masih terdapat rokok ilegal yang ditemukan pada saat di lapangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Satpol PP Kabupaten Sidoarjo berupaya untuk memberantas peredaran rokok ilegal dengan melakukan pendekatan preventif dan tindakan represif terhadap pelanggar aturan. Satpol PP Kabupaten Sidoarjo melakukan kegiatan sosialisasi yang mengedukasi masyarakat terkait dengan dampak yang diakibatkan oleh adanya rokok ilegal serta melakukan koordinasi antar instansi untuk memberantas adanya peredaran rokok ilegal ini. Sedangkan tindakan represif yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo yakni melakukan kegiatan razia serta penyitaan barang jika didapati adanya masyarakat atau pemilik toko yang masih tetap memperjualbelikan rokok yang tidak memiliki pita cukai resmi dan memberikan sanksi kepada pelanggar jika terbukti melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian dan sarana prasarana penunjang penelitian, sehingga masih belum dapat melakukan observasi dan wawancara secara menyeluruh ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dikarenakan waktu yang singkat oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kasatpol PP Kabupaten Sidoarjo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anglaina, J. (2019). Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Illegal Dan Pita Cukai Palsu Di kota Bandar Lampung, Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung. Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56432>
- Darmawan, D. (2019). Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18025>
- Evianny, E dan Sutiyo. (2023). Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Manajemen Kebencanaan. PT. Nas Media Indonesia
- Permana, D. E. W., & Sanusi, S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal. *Hukum Responsif*, 12(1). Diakses dari <https://doi.org/10.33603/responsif.v12i1.5026>
- Global Adult Tobacco Survey (GATS). (2024). *Laporan Survei Global Adult Tobacco Survey 2021 Indonesia*. Diakses dari <https://www.gatsindonesia.org>.
- Hirschi, T. (2017). *Causes of Delinquency*. Transaction Publishers.
- Huberman, M. D. (2019). Teknik Analisis Data. <https://agdesign.me/>
- Ilham, M., & Rahman, A. (2023). Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. PT Pustaka Interes Media Amani.
- Joossens, L., Merriman, D., Ross, H., & Raw, M. (2010). *The impact of eliminating the global illicit cigarette trade on health and revenue*. Diakses dari <https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2010.03018.x>
- Joossens, L., & Raw, M. (2008). *Progress in combating cigarette smuggling: Controlling the supply chain*. *Tobacco Control*, 17(6), 399–404. Diakses dari <https://doi.org/10.1136/tc.2008.026567>
- Kurniawan, D. (2023). Kontrol sosial masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/22177>
- Maulana, H., Syamsuadi, A., & Hartati, S. (2023). Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau. *SUMUR-Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1), 9-18. Diakses dari <https://doi.org/10.58794/sumur.v1i1.464>
- Putri, N. P. J. S. (2024). Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Bea Cukai Dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Mataram Provinsi

- Nusa Tenggara Barat. Diakses dari <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19054>
- Redaksi Sidoarjo Terkini. (2024). Satpol PP dan Bea Cukai Sidoarjo Amankan 1.705 Pak Rokok Ilegal. Diakses dari <https://www.sidoarjoterkini.com>.
- Rudita, Y. (2018). Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses dari <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/14733>
- Scollo, M. (2025). *Improving estimates of the illicit cigarette trade through collaboration: lessons from two studies of Malaysia*. BMJ Publishing Group. Diakses dari <https://doi.org/10.1136/tc-2023-058529>
- Setiawati, F. A. N. (2024). Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Dalam Menyosialisasikan Larangan Pembuatan Rokok Ilegal Tahun 2023 : IAIN SALATIGA. Diakses dari <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/19647>
- Siahaan, S. Br. (2019). Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok. *Anomie*, 1(1), 1–20. Diakses dari <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/anomie/article/view/190>
- Simangunsong, F. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan : Teoritik, Legalistik. Empirik Dan Inovatif.
- Sugiyono, P. D. (2024). *Quantitative, qualitative, and R&D research methods*. Bandung : ALFABETA.